

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Afia Maulina¹, Mustafa Alkamal², Nabilla Salsa Fahira³

Program Studi D IV Akuntansi Reguler^{1,2,3}

Politeknik Keuangan Negara STAN^{1,2,3}

maulinaafia@gmail.com¹, mustafaalkamal7@gmail.com²,

nabillasalsaf@gmail.com³

Abstrak: Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sistem desentralisasi yang dianut oleh negara Indonesia. Hak otonom yang dimiliki oleh pemerintah daerah membuat pemerintah daerah dapat menggunakan kekuasaan seluas-luasnya untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Hak otonom juga tercermin dari daerah yang diberikan wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya. Keuangan daerah yang berkualitas baik menjadi suatu tujuan yang harus dicapai yang tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Penulis melihat pentingnya kinerja keuangan sebagai bentuk analisis atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini penulis menguji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Hasil yang didapat adalah terdapat hubungan positif yang signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan, terdapat hubungan positif yang tidak signifikan untuk variabel Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah.

Kata kunci: pemerintah daerah, kinerja keuangan, otonomi

Abstract: Regional autonomy is a manifestation of the decentralized system adopted by the Indonesian government. The autonomous rights possessed by local governments enable them to use the widest possible power to maximize people's welfare. Autonomous rights are also reflected in the authority to manage the region's own finances. Good quality regional finance is a goal that must be achieved which requires good financial management. The author sees the importance of financial performance as a form of regional financial management. In this study, we tested the factors that influence the financial performance of local governments with independent variables, namely Regional Original Income, Balanced Funds, Capital Expenditures, and Regional Government Size. The results obtained are that there is a significant positive relationship of the region's financial performance with the variables of Regional Original Income and Balancing Funds. Meanwhile, the relationship with the variables of Capital Expenditure and Size of Regional Government is positive and insignificant.

Keywords: local government, financial performance, autonomous

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai salah satu perwakilan pemerintah pusat di setiap daerah mempunyai peran yang krusial, terutama terkait dengan menyejahterakan rakyat. Hal ini disebabkan pemerintah daerah memiliki sebagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkup pemerintah daerah sekaligus untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka menyejahterakan

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

rakyatnya. Inilah yang disebut sebagai otonomi daerah, yaitu pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya ke pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (Miriam Budiarjo, 2003) [5].

Pelaksanaan otonomi daerah tidak serta merta ditafsirkan sebagai bentuk penyerahan kekuasaan tanpa kontrol. Pelaksanaan otonomi daerah tetap dikawal oleh peraturan yang berlaku agar pelaksanaan desentralisasi berada di jalur yang tepat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan [15]. Lebih lanjut dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah daerah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama [15].

Pelaksanaan otonomi daerah juga menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Makna nyata di sini adalah penanganan urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Kemudian, yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tujuan nasional.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah mengelola keuangan daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut [10]. Definisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bergerak di area keuangan daerah.

Keuangan daerah memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik. Keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian daerah, dan sebagainya. Namun, keuangan daerah yang baik mustahil dicapai apabila pengelolaan keuangan daerahnya tidak memadai.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah.

Diperlukan analisis terhadap variabel-variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018) mengambil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sebagai variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah [4]. Awwaliah, Agriyanto, dan Farida (2019) mengambil PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah [6]. Purwasih (2017) mengambil PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebagai variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah [13]. Sedangkan, Sari dan Mustanda (2019) mengambil Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, dan Belanja Modal sebagai variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah [8].

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori Kinerja Keuangan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah [10].

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keseluruhan proses pengelolaan tersebut harus saling terintegrasi, berkaitan, dan dijalankan dengan sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik diasumsikan dapat menyebabkan keuangan daerah yang baik pula. Keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang baik. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Halim (2007), kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang dihitung berdasarkan data keuangan daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio tersebut dapat berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan [1].

Pengukuran kinerja keuangan cukup krusial untuk dilaksanakan sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan [7].

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diarahkan pengukurannya pada angka realisasi total pendapatan daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan terlebih dahulu data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel. Pengambilan total pendapatan sebagai alat ukur kinerja didasarkan pada krusialnya peran pendapatan dalam pelaksanaan keuangan daerah karena pendapatan merupakan sumber utama keuangan daerah dalam melaksanakan belanja pemerintahannya.

Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa digunakan dalam menghasilkan pendapatan untuk menjalankan, baik roda perekonomian maupun roda pemerintahannya. Pendapatan tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan [16]. PAD merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah dan unsur ini akan menjadi ciri khas suatu daerah. PAD tersusun dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah tersusun dari

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam penelitian ini variabel PAD akan diukur berdasarkan angka realisasi PAD dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan terlebih dahulu data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

Dana Perimbangan

Potensi pendapatan tiap daerah tidaklah sama. Ada beberapa daerah dengan potensi pendapatan yang tinggi dan ada yang cukup rendah. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat berwenang untuk menyalurkan dana perimbangan ke setiap daerah di negara Indonesia. Dana perimbangan ini nantinya akan digunakan sebagai sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, baik dalam roda pemerintahan maupun roda perekonomian daerahnya.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [16].

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan bahwa dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antarpemerintah daerah [16].

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah dan unsur ini akan menjadi salah satu alat ukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah, baik terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Dana perimbangan tersusun dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam penelitian ini variabel Dana Perimbangan akan diukur berdasarkan angka realisasi dana perimbangan dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan terlebih dahulu data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

Belanja Modal

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah akan membelanjakan sumber dana yang mereka miliki untuk kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat [15].

Belanja pemerintah daerah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diklasifikasi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja modal yang dibahas dalam penelitian ini merupakan belanja yang bersifat tidak langsung. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi, antara lain, belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Dalam penelitian ini variabel Belanja Modal akan diukur berdasarkan angka realisasi belanja modal kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan terlebih dahulu data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan seberapa besar atau kecil pemerintah daerah tersebut. Dalam mengukur ukuran pemerintah daerah dapat digunakan berbagai proksi dari hal-hal tertentu. Sari dan Mustananda (2019) [8] menggunakan total aset pemerintah daerah sebagai basis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah. Sari Rusmita (2019) [14] juga menggunakan total aset sebagai basis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini variabel Ukuran Pemerintah Daerah akan diukur berdasarkan angka total aset kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan terlebih dahulu data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah serangkaian penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Tabel I. Penelitian Terdahulu

<i>Nama Peneliti</i>	<i>Tahun</i>	<i>Variabel</i>	<i>Hasil</i>
----------------------	--------------	-----------------	--------------

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi	2019	Pendapatan Asli Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
		Dana Perimbangan	Berpengaruh negatif dan signifikan
		Belanja Modal	Berpengaruh positif dan signifikan
Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida	2019	Pendapatan Asli Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
		Dana Perimbangan	Berpengaruh positif dan signifikan
Sari Rusmita	2019	Ukuran Pemerintah	Berpengaruh positif dan tidak signifikan
		Belanja Daerah	Berpengaruh negatif dan signifikan
		Tingkat Kemandirian	Berpengaruh positif dan signifikan
		Tingkat Kemakmuran	Berpengaruh negatif dan tidak signifikan
		<i>Leverage</i>	Berpengaruh negatif dan tidak signifikan
Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda	2019	Ukuran Pemerintah	Berpengaruh negatif dan signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
		Belanja Modal	Berpengaruh positif dan signifikan
Tri Yuni Pratiwi	2018	Pendapatan Asli Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
		Dana Perimbangan	Berpengaruh positif dan tidak signifikan
		Belanja Modal	Berpengaruh positif dan signifikan
Nina Andriany dan Fitri Yani	2017	Pertumbuhan Ekonomi	Berpengaruh positif dan signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
Purwasih	2017	Pendapatan Asli Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
		Dana Perimbangan	Berpengaruh negatif dan signifikan
		Belanja Modal	Berpengaruh positif dan tidak signifikan
Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin	2015	Kekayaan Daerah	Berpengaruh negatif dan signifikan
		Dana Perimbangan	Berpengaruh negatif dan signifikan
		Belanja Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
Salman Alfarisi	2015	Pajak Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
		Retribusi Daerah	Berpengaruh positif dan signifikan
		Dana Perimbangan	Berpengaruh positif dan signifikan

III. HIPOTESIS DAN METODE PENELITIAN

3.1. Perumusan Hipotesis

Hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam maksimalisasi pendapatan asli daerah akan berdampak pada keuangan daerah. Semakin maksimal

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pendapatan asli daerah, semakin baik keuangan daerah sehingga dapat membantu daerah untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan asli daerah mencerminkan potensi yang ada dalam daerah. Pendapatan asli daerah bersifat spesifik dan tidak akan bernilai sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mustanda (2019) [8], peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2017) [13] dan Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida (2019) [6]. Dari penjelasan di atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan

Dana Perimbangan merupakan salah satu perwujudan dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memainkan peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan keuangan daerah. Sebagaimana fakta di lapangan, tidak semua daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sama untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu, dana perimbangan bisa menjadi sumber keuangan tambahan bagi daerah.

Semakin besar dana perimbangan, semakin besar sumber keuangan daerah sehingga akan mendorong kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida (2019) [6], yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuni Pratiwi (2018) [12] juga menemukan adanya hubungan positif, namun tidak signifikan, antara dana perimbangan dan kinerja keuangan daerah. Dari penjelasan di atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan

Dalam melaksanakan fungsi desentralisasi, pemerintah daerah akan melakukan pengeluaran berupa belanja daerah. Belanja modal sebagai salah satu jenis belanja daerah merupakan belanja yang sifatnya produktif dan dapat digunakan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Utilisasi yang tepat dari belanja modal akan membuka peluang lebih besar untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang berujung pada membaiknya kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019) [11] menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama juga didapat oleh Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) [8] dan Tri Yuni Pratiwi (2018) [12]. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2017) [13] menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan. Dari serangkaian penjelasan di atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut.

H3: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Hubungan antara ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan

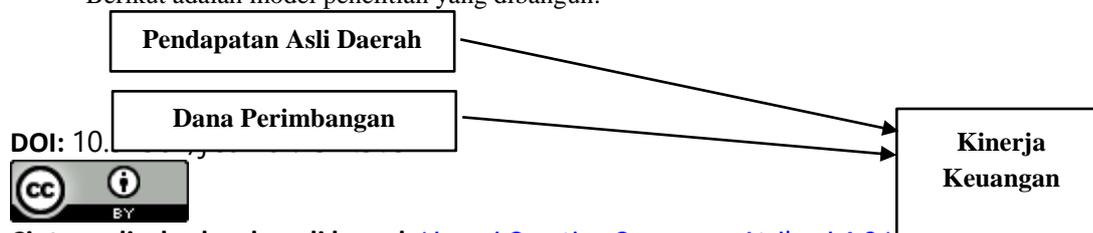
Secara teori, ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini disebabkan pemerintah mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk bisa memaksimalkan potensi daerah. Total aset (yang dijadikan sebagai proyeksi ukuran pemerintah) yang digunakan secara maksimal dan jumlahnya besar akan dapat mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Rusmita (2019) [14] menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang tidak signifikan antara ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan daerah. Di lain sisi Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) [8] menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan daerah. Dari penjelasan di atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut.

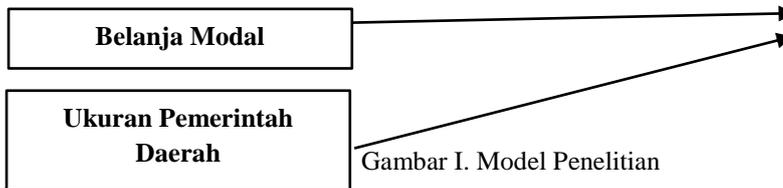
H4: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

3.2. Model Penelitian

Berikut adalah model penelitian yang dibangun.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Gambar I. Model Penelitian

3.3. Metode Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, 33 subjek tersebut diamati selama lima periode (2014—2018) sehingga total jumlah pengamatan adalah sebanyak 165. Data yang diambil merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya laporan realisasi anggaran dan neraca. Data diambil dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada laman www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan aplikasi STATA (*Statistic/Data Analysis*) versi 16 sebagai alat bantu pengolahan statistik. Persamaan model empiris yang digunakan dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (I)$$

Keterangan

- Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ dan β_4 = Koefisien dari variabel independen
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Dana Perimbangan
- X_3 = Belanja Modal
- X_4 = Ukuran Pemerintah Daerah
- α = Konstanta
- ε = *error terms*

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Hasil Regresi

Model tidak memiliki masalah pada uji asumsi klasik multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hal ini diketahui karena sebelum memulai menganalisis, terlebih dahulu dilakukan uji diagnostik. Karena data bersifat panel, terlebih dahulu harus dilakukan beberapa uji untuk menentukan model yang tepat. Model yang tepat yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Uji F dari model ini menunjukkan angka 0.0000 yang menandakan bahwa model regresi ini dapat digunakan. Nilai koefisien determinasi R^2 dari uji ini adalah sebagai berikut.

Tabel II. Nilai Koefisien Determinasi R^2

Kategori	Nilai R^2
Within	0.8251
Between	0.9772
Overall	0.9633

Sumber: data sekunder diolah melalui STATA

Secara keseluruhan nilai R^2 tertera sebesar 96,33%. Ini menandakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah dapat menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan sebanyak 96,33%. Sisanya, yaitu sebesar 3,67%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil dari regresi berganda yang diolah melalui aplikasi STATA adalah sebagai berikut.

Tabel III. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Signifikansi	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	0.1099516	0.000	Signifikan
Dana Perimbangan (X_2)	0.7297694	0.000	Signifikan
Belanja Modal (X_3)	0.0387883	0.334	Tidak Signifikan

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Ukuran Pemerintah Daerah (X_4)	0.0464291	0.525	Tidak Signifikan
Konstanta	3.085626	0.167	Tidak Signifikan

Sumber: data sekunder diolah melalui STATA

Penerapan hasil regresi di atas dalam persamaan regresi adalah sebagai berikut.

$$Y = 3.085626 + 0.1099516X_1 + 0.7297694X_2 + 0.0387883X_3 + 0.0464291X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (II)$$

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. Koefisien 0.1099516 untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa penambahan satu satuan dari pendapatan asli daerah akan membuat variabel kinerja keuangan bertambah 0.1099516 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan tingkat signifikansi 0.0000, H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Plyriadi [11], Farida [6], Mustanda [8], Pratiwi [12], Panggabean [9], dan Purwasih [13].

Pendapatan asli daerah merupakan sumber daya yang berasal dari kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah di wilayah otonominya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Variabel dana perimbangan (X_2) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. Koefisien 0.7297694 untuk variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa penambahan satu satuan dari dana perimbangan akan membuat variabel kinerja keuangan bertambah 0.7297694 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan tingkat signifikansi 0.0000, H2 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Farida dkk. [6] dan Alfarisi [2], namun bertentangan dengan penelitian Aliamin dkk. [3], Plyriadi dkk. [11], dan Purwasih [13].

Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah. Tambahan dana dari APBN akan meningkatkan realisasi pendapatan pada pemerintah daerah. Namun, pengaruh positif signifikan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan dapat mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara masih kurang secara umum.

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Variabel belanja modal (X_3) memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. Dengan tingkat signifikansi 0.334, H3 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Purwasih [13].

Tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah belanja modal mungkin tidak digunakan untuk aset yang produktif. Penyaluran belanja modal kepada aset produktif dipandang sangat perlu untuk dilakukan sebab hal itu akan memicu maksimalisasi potensi daerah, khususnya pada area pendapatan.

Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Variabel ukuran pemerintah daerah (X_4) memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. Dengan tingkat signifikansi 0.525 untuk variabel ukuran pemerintah daerah, H4 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rusmita [14].

Kemudian, untuk ketidaksignifikanan pengaruh ukuran pemerintah daerah juga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah utilisasi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang mungkin belum maksimal. Jika aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, sangat mungkin kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi terdampak positif, khususnya pada realisasi yang lebih besar lagi untuk pendapatan daerah.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil regresi berganda, variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu,

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasannya ada pada objek yang lingkungannya hanya di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut membuat penelitian ini lebih relevan untuk menilai kondisi di Provinsi Sumatera Utara saja. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen sehingga tidak menggambarkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini menyajikan informasi untuk pemerintah daerah pada Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun strategi pencapaian target realisasi pendapatan. Pemerintah daerah disarankan untuk terus mengeksplorasi potensi pendapatan asli daerahnya. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan, baik bagi pemerintah pusat maupun pembuat kebijakan, untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam menyelaraskan dengan program-program nasional.

Beberapa saran dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, objek penelitian dapat dikembangkan, dari yang sebelumnya hanya dalam batasan provinsi menjadi batasan pulau atau bahkan setiap kota atau provinsi di Indonesia. Kedua, variabel independen lain yang diduga dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah dapat ditambahkan. Pengembangan objek dan variabel akan membuat hasil penelitian lebih relevan untuk lebih banyak objek dan dapat dijadikan salah satu sumber ilmiah bagi kota atau provinsi yang bersangkutan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah masing-masing.

REFERENSI

- [1] Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- [2] Alfarisi H., Salman. 2015. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)" [Skripsi]. Padang: Universitas Negeri Padang.
- [3] Aliamin, dkk. 2015. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 3 (2): 168-18.
- [4] Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *E-Jurnal Manajemen*. Vol. 7 No. 2: 2302-8912.
- [5] Budiarmo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- [6] Farida, Dessy Noor, dkk. 2019. "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*. 1 (1): 25-45.
- [7] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- [8] Mustanda, I Ketut dan Ni Made Diah Permata Sari. 2019. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen*. 8 (8): 4759-4787.
- [9] Panggabean, Fitri Yani dan Nina Andriany Nasution. 2017. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara." *Universitas Pembangunan Panca Budi*. 8 (1): 1-19.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [11] Plyriadi, Annas dkk. 2019. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Tata Kelola*.
- [12] Pratiwi, Tri Yuni. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012—2016 [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- [13] Purwasih. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah" Kabupaten/Kota DIY Tahun 2011—2016). Universitas PGRI Yogyakarta.

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [14] Rusmita, Sari. 2019. "Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance". International Research in Economics and Finance. 3 (2): 29-35.
- [15] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [16] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DOI: 10.52362/jisamar.v5i2.373



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
(Statement of Authenticity of Status)

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Judul naskah:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penulis:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama : Afia Maulina | e-mail : maulinaafia@gmail.com |
| 2. Nama : Mustafa Alkamal | e-mail : mustafaalkamal7@gmail.com |
| 3. Nama : Nabilla Salsa Fahira | e-mail : nabillasalsaf@gmail.com |

Nama dan alamat penulis 1 (perwakilan) untuk korespondensi:

Nama : Afia Maulina

Alamat: Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15222

Telp. : 082322260896

e-mail : maulinaafia@gmail.com

- Jurnal/Artikel tersebut di atas merupakan naskah asli, hasil karya penulis, dan bukan merupakan plagiat dari artikel atau karya ilmiah orang lain.
- Jurnal/Artikel tersebut di atas belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang diajukan untuk dimuat pada jurnal atau media lainnya.
- Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batang, 28 April 2021

Penulis 1,



Afia Maulina

Penulis 2,



Mustafa Alkamal.

Penulis 3,



Nabilla Salsa Fahira

Publisher Address :

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta
Jalan Salemba I No. 10 Jakarta Pusat 10430 Indonesia, Telp. 021-3905050

<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>
jisamar@jayakarta.ac.id, jisamar2017@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI
(Statement of Publication Availability)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama (Penulis 1) : Afia Maulina
Asal Institusi : Politeknik Keuangan Negara STAN
No. Telepon : 082322260896
Email : maulinaafia@gmail.com

Bersama ini saya menyatakan **BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~***) untuk publikasi paper dengan judul:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

di JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research): Vol. 5 No. 2 Tahun 2021.

Saya menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut di atas terbebas dari unsur plagiarism dan publikasi ganda (belum pernah dipublikasikan ke media mana pun), serta tidak akan diterbitkan ulang pada Jurnal/Buku dan atau majalah lainnya.

Saya juga bersedia membayar biaya publikasi pada *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)* sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku**).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa paksaan dari pihak mana pun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 28 April 2021
Yang Membuat Pernyataan
Penulis 1,


(Afia Maulina)

Penulis 2,


(Mustafa Alkamal)

Penulis 3,


(Nabilla Salsa Fahira)

Note:

* :Coret yang tidak sesuai(disesuaikan)

** :Dibayar setelah artikel dinyatakan SIAP PUBLISH. Biaya publikasi bisa dilihat di web JISAMAR

Publisher Address :

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta
Jalan Salemba I No. 10 Jakarta Pusat 10430 Indonesia, Telp. 021-3905050
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>
jisamar@jayakarta.ac.id, jisamar2017@gmail.com